

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG KEMIRI DISTRIK MAKKI KABUPATEN LANNY JAYA

Etius Kogoya<sup>1)</sup>, Beatus Tambaip<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### Abstract :

*The purpose of this study is to find out how the implementation of Village Fund management in Kemiri Village, Makki District, Lanny Jaya Regency, to find out how productive economic business is in Kemiri Village, Makki District, Lanny Jaya Regency. And to find out whether the implementation of Dana Desa (DD) management in Kemiri Village can improve the community's economy. This study aims to analyze the implementation of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Kemiri Village, Makki District, Lanny Jaya Regency in 2020 and analyze the obstacles that hinder the implementation of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Kemiri Village in 2020. The author uses qualitative research methods with 10 key informants and data sources in the form of documents and researchers as research instruments to obtain data that meets the requirements in writing this scientific paper. The results of this study indicate that: a). Implementation of Village Fund Management in Improving the Community Economy in Kemiri Village, Lanny Jaya Regency in 2020, which includes indicators: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy has been going well, although there are still people who are not satisfied with the implementation of the Village Fund program in improve the economy of the people in Kemiri Village in 2020. b). The obstacles to implementing Village Fund management in Improving the Community Economy in Kemiri Village, Makki District include: psychological constraints on the distribution of village funds that are not in accordance with technical guidelines/or lacking, the market field is difficult to predict for external markets, political constraints of the Regency Government, District Government, Government The village is not consistent in the funding ceiling available for serious realization in the village but there is budget politics, the village government's authority does not run optimally, practical political factors during the election are a measure of the distribution of village funds, resource constraints all SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) is regulated by District Government because the Human Development Index in Kemiri Village is still low in special skills, there is no reality, this can be seen in the realization of the distribution budget for non-physical village funds, which is more than for physical development.*

### Abstrak :

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Kemiri Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya, untuk mengetahui bagaimana usaha ekonomi produktif di Kampung Kemiri Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya. Dan untuk mengetahui apakah implementasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Kampung Kemiri dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk analisis implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kampung Kemiri Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2020 dan menganalisis kendala-kendala penghambat dalam implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Kemiri Tahun 2020. Penulis menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Informan Kunci 10 orang dan sumber data berupa dokumen dan peneliti sebagai instrumen penelitian hingga memperoleh data yang memenuhi syarat dalam penulisan karya ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Kemiri Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2020, yang meliputi indikator: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan telah berjalan dengan baik, walaupun masih adanya masyarakat yang kurang puas terhadap pelaksanaan program Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Kemiri Tahun 2020 tersebut. b). Kendalakendala implementasi pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kampung Kemiri Distrik Makki antara lain : kendala psikologis distribusi dana desa tidak sesuai juknis/atau kurang, medan pasar yang pegenungan yang sulit untuk pasaran luar, kendala politis Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung tidak konsisten pada pagu dana yang tersedia untuk realisasi serius di kampung tetapi ada politis anggaran maka kewenangan Pemerintah kampung tidak berjalan secara optimal, faktor politis praktis waktu pilkada menjadi ukuran distribusi dana kampung, kendala sumberdaya semua pelaporan anggaran SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) diatur oleh Pemerintah Kabupaten karena Indeks Pembangunan*

*Manusia (IPM) di Kampung Kemiri masih rendah tenaga kehalian khusus belum ada realita ini terlihat di realisasi anggaran distribusi dana desa nonfisik lebih banyak dibandingkan dengan pembangunan fisik.*

**Keyword: *Implementation, Village Fund Management in Improving the Economy***

## PENDAHULUAN

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat kita lihat, apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak (Sukmana, 2016; Elviandri, 2019). Masalah kemiskinan dan Kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspon oleh pemerintah penyantunan kebijakan kesejahteraan (Suryawati, 2005; Solikaton, dkk, 2014; Idris, dkk, 2021).

Untuk membangun kesejahteraan masyarakat dibutuhkan bantuan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah, sayangnya hasil dari bantuan pemberdayaan tersebut belum mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta sektor Pendidikan (Chotimah & Anggraini, 2018; Amir & Nasution, 2017). Hal ini kemungkinan besar disebabkan pola hidup masyarakat yang masih bersifat konsumtif dan rata-rata Pendidikan masyarakat di Provinsi Papua masih relatif rendah. (Hamadi, 2021).

Permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kampung Kemiri Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya dapat diketahui berdasarkan data BPS Provinsi Papua sebagai berikut: Pertumbuhan Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Papua (IPM) dalam kurung waktu tahun 2019 sebesar 60,84 kemudian pada tahun 2020 menjadi penurunan sebesar 60,44. Angka harapan hidup tahun 2019 sebesar 65,65. Angka harapan hidup tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 65,79. Kemudian sektor kesejahteraan

masyarakat yaitu : Persentase penduduk miskin Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 27,53 kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,64. Adapun pada tahun 2020 angka melek huruf tahun 2020 sebesar 22,10. Kemudian Sektor PDRB Provinsi Papua menurut lapangan usaha 2016-2020 yaitu : a) Pertanian kehutanan dan perikanan tahun 2020 sebesar 0,67. b). Pertambangan dan pengalihan tahun 2020 sebesar 16,62. c) Industri pengelolaan/Manufacturing pada tahun 2020 semakin meningkat sebesar 5,02. d) Pengadaan Listrik dan Gas Electricity & Gas tahun 2020 sebesar 0,96. e) Pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tahun 2020 sebesar 2,88. f) Konstruksi tahun 2020 sebesar 0,85. g) Perdagangan besar dan eceran tahun 2020 sebesar 2,48. h) Transportasi dan pergudangan tahun 2020 sebesar 33,63. i) Penyediaan akomodasi makan minum tahun 2020 sebesar 16,93. j) Informasi dan komunikasi tahun 2020 sebesar 3,72. k) Jasa keuangan dan asuransi tahun 2020 sebesar 1,47. l) Real estat aktifitas tahun 2020 sebesar 0,23. m) Jasa perusahaan tahun 2020 sebesar 7,62. n) Jaminan Sosial wajib tahun 2020 sebesar 0,19. o) Jasa Pendidikan tahun 2020 sebesar 0,64. p) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial /human tahun 2020 sebesar 3,82. Kemudian sektor rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 5,59. Menurut rasio gini tahun 2020 sebesar 0,394 (BPS, 2020).

IPM Kabupaten Lanny Jaya tahun 2020 sebesar 47,86. Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 38,13. Angka harapan hidup tahun 2020 sebesar 66,00. Angka melek huruf tahun 2020 sebesar 68,56 kemudian menurut rasio gini sebesar 0,297 adapun rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 2,00. Laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar 5,39 kemudian distribusi

PDRB ADHB sebesar 100.00. Sektor laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di pasar sebesar 6.81 kemudian distribusi PDRB sebesar 4.04. Adapun harga konstan sebesar 44.97. Kemudian sektor PDRB ADHB menurut lapangan usaha sebesar 36.31. Kemudian PDRB ADHB menurut lapangan usaha sebesar 1047896.6. (BPS, 2020).

Sesuai dengan data Bapeda Kabupaten Lanny Jaya dalam angka 2018 Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kampung Kemiri. Ketika berdampak positif, otonomi juga memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum ditingkat daerah untuk melakukan pelanggaran. Hal itu menyebabkan pertentangan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Rahmadsyah, 2017).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan

gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat. Dan desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll.

Berkenaan dengan desentralisasi/ otonomi maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Kogoya, dkk, 2020; Kobak, 2020; Magai & Ohoiwutun, 2021; Ronsumbre & Aidah, 2021).

Pada saat ini, alokasi dana desa sangat gencar oleh pemerintah dan daerah untuk dijadikan sebagai sumber awal dari sebuah pendapatan desa, ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa memanfaatkan dana desa. Hal ini melalui berbagai proses sehingga pemanfaat dana desa sesuai dengan pemerintah daerah dan pusat, pemenuhan ini berdampak kepada sektor perekonomian seperti program pemberdayaan masyarakat seperti di desa kemiri yang memprogramkan simpan pinjam perempuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri hal ini tentu berdampak pada sektor perekonomian masyarakat itu sendiri, dan tentunya menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat (Suharyono, 2020).

Pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya: Membina kehidupan masyarakat desa, Membina ekonomi desa, Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. Salah satu pola pendek atau pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan

menumbuhkan kebersamaan desa (Timotius, 2018; Nugroho, 2018).

Pemberdayaan ekonomi ditingkat desa ada yang berdampak positif dan negatif. Keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan sangat penting dalam pemberdayaan seperti pembekalan ekonomi kreatif yang dilakukan ditingkat desa untuk menunjang ekonomi di desa. Dampak negatif ada sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan ini, hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak baik (Ilham, dkk 2020).

Adanya dana desa pemerintahan desa Kemiri mendapatkan suntikan dana untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat dengan membuat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ini juga memberikan positif terhadap semua elemen yang ada di desa untuk kepentingan bersama. Perangkat desa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat di desa dan bekerjasama semua elemen di desa untuk mengadakan bermusyawarah. Di setiap kampung yang ada di distrik makki, perangkat desa membuat pembinaan terhadap masyarakat untuk kemandirian ekonomi. Pembinaan kemandirian ekonomi sangat penting di bina dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak terjadi kesenjangan ekonomi (Ilham, dkk, 2020).

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa akan memberikan dampak positif untuk desa. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan, pembuatan laporan Dana Desa. Namun dari sisi lain sebagian masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintahan desa kemudian semua perencanaan diatur dari atasan pemerintah kabupaten. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagian masyarakat tidak ada kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka artikel ini memfokuskan kajian pada Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Kemiri Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu kepala kampung kemiri, Sekertaris Kepala Kampung, Kepala Distrik , 1 Orang Bamuskam, 2 Orang Aparat Kampung Kemiri, 2 Orang Tokoh Masyarakat dan 5 Masyarakat Kampung Kemiri yang di pilih secara acak. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Pengelolaan Dana desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Kemiri Distrik Makki Tahun 2020**

Dalam Implementasi Kebijakan publik yang berkaitan dengan urusan Lintas Batas Wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea mempunyai implikasi bahwa kebijakan publik merupakan hasil dialog antar aktor dan orientasinya adalah tujuan. Selanjutnya, kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, sejumlah keputusan, dan pelaksanaan.

Perlunya melaksanakan sebuah kebijakan secara efektif ialah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari kebijakan Dana Desa (DD), yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa/Kampung dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan pemerintahan desa sendiri.

Dalam penelitian ini untuk ukuran efektivitas pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Kampung Kemiri yaitu dengan

menggunakan kinerja implementasi. Menurut Ripley aspek yang digunakan untuk bisa menilai policy output yaitu 1). Akses 2). Cukupan (Coverage), 3). Frekuensi 4), Bias, 5) Ketepatan layanan (servis delivery), 6). Akuntabilitas, dan 7). Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan (Purwanto & Dyah 2012 : 105 ).

Pada kebijakan Dana Desa (DD) di Kampung Kemiri Distrik Makki diketahui bahwa akses yang diterima oleh Pemerintah Kampung Kemiri untuk memanfaatkan Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya cukup mudah. Pemerintah Kampung Kemiri dimudahkan dengan adanya bimbingan dari Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Sehingga Pemerintah Kampung Kemiri tidak akan menemui kesulitan dalam mengakses kebijakan Dana Desa. Sedangkan akses untuk masyarakat Kampung Kemiri sendiri bersifat inklusif, diwakili oleh Bamuskam dan juga tokoh masyarakat melalui pelaksanaan Musrembang Kampung Kemiri. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 tentang hak masyarakat desa dalam penyampaian aspirasi, saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis.

Kelompok sasaran dalam kebijakan Dana desa (DD) di Kabupaten Lanny Jaya ialah Aparatur Pemerintah dan masyarakat Kampung. Pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Kampung Kemiri, dalam pembagian dana untuk pelayanan dasar dan operasional Pemerintah Kampung sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lanny Jaya tentang Dana Desa. Untuk menjalankan roda Pemerintah di Kampung Kemiri sudah terpenuhi dalam bentuk operasional Pemerintahannya, begitu juga untuk pelayanan Kesehatan, peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dimana dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Kampung Kemiri baik Pembangunan fisik maupun Pembangunan nonfisik di Kampung Kemiri dilaksanakan bergantian

sesuai dengan hasil musyawarah Kampung Kemiri.

Pada kebijakan Dana Desa (DD) ini waktu pelaksanaannya ialah 4 kali dalam 1 tahun dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa tidak pernah terlambat, dikarenakan dari pihak Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya sendiri selalu tepat waktu dalam mengumpulkan SPJ di setiap bulan sedangkan Pemerintah Kampung Kemiri hanya mengumpulkan bukti-bukti saja tetapi menyangkut SPJ Pelaporan pihak Pemda yang membuat dokumen semua proses Pelaporan di setiap triwulan. Dengan ketepatan waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, maka tentunya tidak ada masalah dalam turunnya anggaran dan pelaksanaan kebijakan berjalan waktu pada setiap triwulan.

Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kemiri kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya khususnya pada pelaksanaan tahun 2020 ini tidak menemukan permasalahan tetapi jumlah dananya tetap namun sistem pengelolaan pada tetap diintervensi yang melalui oleh Dinas BPMK sehingga ada kekurangan dana sedangkan Dana Kampung Kemiri tidak berubah itu terlihat di JUKNIS dan realisasi anggaran tahun 2019 -2020-2021.

Kemudian tidak turunnya Dana pada waktu selanjutnya, Adapun menyangkut pertanggungjawab terhadap Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya ,pertanggungjawab terhadap masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawab pada setiap kegiatan, tidak semua masyarakat diundang dan mengetahui tentang penggunaan anggaran Dana Desa (DD) untuk apa saja.

Hal yang kurang atau teknis Pemerintah Kampung dan Masyarakat tidak tau pemaparan SPJ karena publik harus tau apakah penggunaan dana desa harus sesuai pelaporan dan realisasi atau tidak karena peneliti amati bahwa semuanya masyarakat dan aparatur kampung tidak tau karena sistem pelaporan terpusat di Pemda. Keadaan ini juga tidak kontrol dari masyarakat

Kemiri sebagai bentuk kewajiban masyarakat seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat 2 tentang kewajiban masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Adanya kebijakan Dana Desa (DD) ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kampung khususnya Kampung Kemiri adanya kebijakan ini tentunya diharapkan untuk membantu keuangan Kampung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, meningkatkan usaha-usaha produktif masyarakat mencapai kesejahteraan. Untuk point terakhir, Sesuai keadaan daerah semua fasilitas Pemerintahan Kampung dari Kantor Kampung baru terbangun, balai Kantor Kantor masih layak, pembangunan jalan sangat layak serta sarana Ibadah Gedung gereja layak, Puskesmas, Gedung sekolah, sarana ekonomi Gedung pasar jalan-jalan dari kampung ke Kabupaten semuanya sangat layak.

Kemudian Mekanis proses keuangan terjadi beberapa tahapan yaitu : Dalam pelaksanaan ada verifikasi dilakukan setelah adanya Musrembang di Kampung Kemiri dari verifikasi di Distrik Makki, selanjutnya verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas BPMK kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemudian ada pencairan dari kas daerah menuju ke kas Kampung tetapi cacatan kebijakan intervensi daftar pemotongan sudah ada datang di Kasda dari Pemda BPMK karena SPJ yang dibuat oleh Pemda Lanny Jaya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terkait dengan analisis pengelolaan Dana Desa yang ada di Kampung Kemiri Distrik Makki Tahun 2020, yang mengacu pada teori analisis kebijakan yang disampaikan oleh Dunn (2003 : 610) yang meliputi : Efektivitas, Efisien, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan telah berjalan dengan baik, walaupun masih adanya kekurangan sana-sini tidak puas masyarakat terhadap pelaksanaan program Dana Desa di Kampung Kemiri Tahun 2020. Hal ini

seperti yang disampaikan oleh para informan bahwa ketidakpuasan masyarakat tersebut dikarenakan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kampung Kemiri sangat terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi keinginan dari masyarakat, akan tetapi Pemerintah Kampung Kemiri selalu berpegang pada skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kampung Kemiri melalui Musrembang yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Kemiri bersama dengan masyarakat dan Bamuskam Kampung Kemiri pada setiap tahunnya.

### **Kendala-Kendala dalam Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kampung Kemiri Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2020**

Analisis Pengelolaan Dana Desa sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kemandirian usaha serta membuka sentral-sentral objek pasar dengan mengembangkan usaha lokal sesuai kondisi kampung, sebelum adanya kebijakan Dana desa ini dulunya masyarakat belum maju serta memikirkan bagaimana kehidupan orang untuk berusaha karena belum ada dana tetapi dengan adanya kewenangan desa maka tahun 2020 semua masyarakat yang mendiami daerah kampung Kemiri telah mempunyai usaha-usaha di setiap keluarga walaupun ada kendala-kendala memang ada tetapi itu wajar karena manusia pada kodratnya keinginan sesuatu untuk mendapatkan tidak bisa dibatasi oleh waktu selalu ingin menambah kebutuhan.

Kemudian adanya desa, daerah ini sudah menjadi perubahan yang signifikan yaitu jalannya sudah masuk kampung, adanya listrik, di pinggir jalan adanya kios-kios, ada menjual hasil bumi, mempunyai kelompok tani tanaman kopi, setiap KK peneliti temui ada setiap KK memiliki ternak baby, kelinci, bibit ikan, ada padat karya kebun rakyat semua fenomena kemajuan ekonomi ini dulunya belum ada.

Dimana dalam Analisis pengelolaan Dana Desa banyak mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui kendala peneliti menggunakan konsep yang di sampaikan oleh Winarno (2008:225) kendala-kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan Dana Desa antara lain : Kendala psikologis, kendala ekonomis, kendala teknis, kendala politis, kendala sumber daya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan para informan, maka dapat diperoleh hasil dari kendala analisis pengelolaan kebijakan Dana Desa (DD) di Kampung Kemiri yaitu :

*Kendala Psikologis.* Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dengan kendala Psikologis bahwa analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat selalu ambatan kerana setiap KK dulunya tidak perna berusaha keras dalam dunia wirausaha hanya hidup komsumti saja ketersediaan alam tetapi kerana dunia sekarang mamasuki dunia industri dari masyarakat yang dulunya tergantung pada alam yang ada. Jadi peneliti temukan bahwa masyaraat merasa malu minder dalam wirausaha itu terbukti di dokumen perencanaan serta realisasi anggaran 2020 80 % itu belanja pada non fisik kemudian 2 % belanja pada pembangunan fisik. Jadi paradikma mainset berpikir masyarakat hanya belanja habis pake saja tidak memikirkan jangka panjang menanam saham.

*Kendala Ekonomis.* Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan terkait dengan kendala ekonomis dalam analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Perekonomian, memang dana desa yang ada juknis nilai tetap tidak berubah dari tahun ke tahun hanya saja distribusi dana desa ke setiap usaha secara ekonomi menjadi hambatan baik aparatur kampung maupun masyarakat. Namun secara semangat ekonomi keadaan ini tidak menjadi hambatan mereka tetap berusaha maju dalam mengelola usaha perekonomiannya. Itu terbukti peneliti temui 300 KK suda

punya rumah layak uni itu memakai konsep patungan.

*Kendala Teknis.* Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan para informan terkait dengan kendala teknis, maka secara teknis analisis pengelolaan Dana Desa di Kampung Kemiri Tahun 2020 secara teknis mengalami hambatan atau kendala, terbukti di realisasi anggaran dengan laporan pertanggungjawab SPJ tidak relevan dengan distribusi dana desa ke tingkat Pemerintahan Kampung karena akan berpengaruh terhadap psikologis pengelolaan analisis dana desa dalam meningkatkan perekonomian. Kemudian akan berpengaruh juga terhadap psikologis pelaksana pejabat yang ada di atasnya.

*Kendala Politis.* Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan para informan, bahwa kendala politis juga merupakan hambatan yang ada di Kampung Kemiri dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa Tahun 2020. Adanya pelaksanaan distribusi politik anggaran yang nampak di realisasi maupun SPJ pada pelaporan ini menjadi hambatan sekali menurut wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian dengan masyarakat bahwa. Memang kami susun rencana itu bagus-bagus sesuai pagu dana juga tidak berubah setiap tahun hanya saja semua kebijakan program ini di intervensi terlalu banya dari Pemda BPMK maka ini mejadi kondisi politis bagi kami untuk mewujudkan progma yang sukses. Ketika dalam proses akhir selalu mengambil kebijakan baik dari Kepala Kampung, Kepala distrik serta BPMK selalu ada pengalihan atau pemotongan biaya tertentu untuk menaikkan sura DPT dalam kandidat tertentu dalam berpolitik kegiatan dari rencana yang ditetapkan.

*Kendala Sumber Daya.* Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti terkait dengan kendala sumberdaya dalam analisis pengelolaan Dana Desa di Kampung Kemiri Tahun 2020. Memang belum adan tenaga profesional tenaga khusus masyarakat setempat, IPM sangat terpengaruh dalam pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan perekonomian maka masih

rendahnya pemahaman tentang berwira usaha setiap keluarga yang ada di Kampung Kemiri. Yang ada adalah Penanggung Jawab Administrasi kegiatan (PJAK) dan Penanggung Jawab Operasioanal kegiatan (PJOK). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terkait dengan kendala analisis pengelolaan Dana Desa (DD) di Kampung Kemiri Distrik Makki peneliti menggunakan konsep yang disampaikan oleh Winarno (2008 : 225 ) kendala-kendala yang sering terjadi dalam analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian, kendala teknis, kendala politis, kendala sumber daya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Implemenasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kampung Kemiri Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2020, yang meliputi indikator : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan telah berjalan dengan baik, walaupun masih adanya masyarakat yang kurang puas terhadap pelaksanaan program Dana Desa di Kampung Kemiri Tahun 2020 tersebut .

Kendala-kendala analisis pengelolaan Dana Desa Kebijakan Dana Desa (DD) di Kampung Kemiri Distrik Makki antara lain adalah kendala sumber daya, kendala psikologis dari pelaksanaan kegiatan, kendala kecukupan, kendala politis yaitu masyarakat dan pemerintah Menyusun perencanaan bersama serta jumlah pagu dana juga tidak berubah dari tahun ke tahun tetapi Pemerintah secara politis intervensi kebijakan pemotongan dana selalu ada sehingga sebagian program perencanaan yang lain di usulkan tidak di realisasi.

Kendala lain adalah IPM sangat rendah sehingga analisis pengelolaan dana desa

dalam meningkatkan perekonomian belum optimal serta sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha-usaha produktif masyarakat Kampung Kemiri Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.

### Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian di Kampung adalah *pertama*, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Pemerintahan Distrik Makki, Pemerintah Kampung Kemiri harus konsisten pada perencanaan bersama yang di lakukan tahap pertama serta memberikan dana seutuhnya sesuai Juknis kepada masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat dikelola dengan baik.

*Kedua*, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Pemerintahan Distrik Makki, Pemerintah Kampung Kemiri merubah program perencanaan pembangunan nonfisik ke pembangunan fisik karena realita realisasi anggaran tahun 2020 80 % mayoritas di pembangunan nonfisik sedangkan 20 % pembangunan fisik oleh sebab itu penulis sarankan agar perencanaan bersama kedepan dirumuskan untuk dibagi 50 % Pembagian fisik, sedangkan 50 % pembangunan nonfisik karena Dana ini beredar di Daerah Kampung mesti wajah pembangunan infrastruktur harus terwujud.

*Ketiga*, Perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat Kampung Kemiri, walaupun dana yang diterima tidak cukup, tetapi dalam peningkatan frekuensi IPM masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan ekonomi usaha-usaha produktif lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, F. R., & Nasution, S. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendidikan, Agama, Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan. *Qardhul Hasan: Media pengabdian kepada masyarakat*, 3(1), 61-73.
- Budiaman, H., & Mulyanti, D. (2021). Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 116-122.
- BPS. (2020). *Provinsi Papua dalam Angka*. Jayapura, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Chotimah, I., & Anggraini, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan Dan Lingkungan Di Desa Warujaya. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 62-72.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan). *Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta*.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266.
- Hamadi, H. Y. (2021). *Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Papua*. Media Sains Indonesia.
- Idris, U., Frank, S. A. K., Hindom, R. F., & Nurung, J. (2021). Family planning (KB) practices and the impact on Papuan women reproductive health. *Gaceta Sanitaria*, 35, S479-S482.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Ilham, I., Korwa, F. Y., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2020). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Asey Besar Danau Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(2), 142-155.
- Kobak, N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 136-145.
- Kogoya, F., Partino, P., & Muhdiarta, U. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Kumbu Kabupaten Torikara Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 127-135.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013 Lis.
- Magai, Y., & Ohoiwutun, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 1-9.
- Nugroho, H. S. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Journal of Governance*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Rahmadsyah, N. (2017). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal* (Doctoral dissertation).
- Ronsumbre, L. H. Y., & Aedah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2020 di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2) 62-74.
- Solikaton, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70-90.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*, 2(1), 103-122.

- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori & Proses* (Edisi Revisi). MedPress, Yogyakarta.